

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin melalui penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan distribusi pendapatan, serta perluasan kesempatan kerja (Pratama & Taufiqurrachman, 2025). Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya dinilai dari tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Namun demikian, pada kenyataannya kemiskinan masih menjadi permasalahan yang tidak hanya dialami oleh negara berkembang, tetapi juga masih ditemukan di negara-negara dengan tingkat perekonomian yang sudah maju. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi saja tidak menjamin bahwa hal tersebut tidak cukup untuk menghapuskan kemiskinan secara menyeluruh, karena masih banyak masyarakat yang masih terjebak dalam keterbatasan dan masih belum mampu untuk keluar dari lingkaran kemiskinan (Sutrisno & Taufiqurrachman, 2025). Kondisi tersebut menempatkan kemiskinan sebagai tantangan yang perlu penanganan secara sistematis dan terarah.

Menurut Budiansyah (2023), kemiskinan dipahami sebagai permasalahan sosial yang bersifat kompleks dan mencakup berbagai aspek, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya berfokus pada satu aspek tertentu saja, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Secara konsepsional, kemiskinan tidak hanya diartikan sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pokok

seperti sandang, pangan dan papan. Bagi manusia, ketiga kebutuhan tersebut termasuk ke dalam kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan tersebut sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Kemiskinan juga merupakan konsekuensi dari ketidakseimbangan proses pembangunan serta terbatasnya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan sumber daya dan peluang dalam aktivitas perekonomian (Syahrul Fauzi et al., 2022). Terbatasnya akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja yang memadai membatasi kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Berdasarkan uraian tersebut, kemiskinan dianggap sebagai permasalahan yang bersifat struktural yang melibatkan berbagai macam aspek.

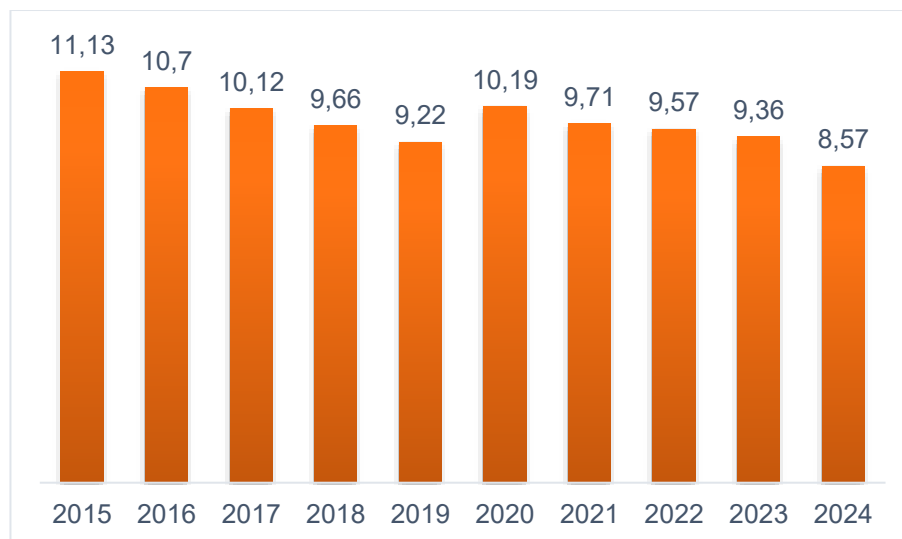
Kemiskinan sendiri dapat diartikan sebagai kondisi di mana masyarakat tidak memiliki kemampuan atau belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya serta memiliki akses yang terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta tidak adanya kesempatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Hartoto, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan sangat berkaitan erat dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang berbanding terbalik dengan jumlah masyarakat. Sehingga dapat berdampak pada produktivitas dan kemampuan seseorang untuk memperoleh pendapatan yang layak. Terbatasnya akses ke pendidikan juga bisa menyebabkan penurunan tingkat keterampilan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan terbatasnya layanan kesehatan dapat menyebabkan turunnya kemampuan fisik dan kualitas hidup masyarakat. Sehingga dapat memperbesar kemungkinan masyarakat untuk tetap dalam kemiskinan.

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan struktural yang sangat kompleks dan belum terselesaikan di Indonesia. Hal ini berdampak langsung pada

tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Angka kemiskinan yang tinggi dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, menurunkan daya beli masyarakat, dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kemiskinan di Indonesia selama ini telah menjadi hambatan utama untuk mencapai target pembangunan ekonomi yang inklusif. Idealnya, pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, menciptakan lebih banyak kesempatan kerja yang produktif, serta mendorong pemerataan pendapatan di berbagai sektor. Masalah kemiskinan justru menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan tercapainya tujuan tersebut, karena sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses manfaat dari pembangunan ekonomi (Istikomah & Taufiqurrachman, 2025).

Masalah kemiskinan tersebut tidak hanya dapat dicerminkan dari rendahnya pendapatan yang dihasilkan oleh satu individu, melainkan berhubungan juga dengan terbatasnya akses pada sumber daya ekonomi, kurangnya peluang kerja sehingga masalah tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyelesaikan salah satu masalah saja, akan tetapi masalah tersebut harus diselesaikan secara bersamaan karena berbagai faktor yang memengaruhi kemiskinan saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain (Hilmy Abdullah & Astuti, 2023). Oleh karena itu, untuk mengurangi kemiskinan perlu strategi yang melibatkan pembangunan manusia, pemerataan distribusi pendapatan, dan pembukaan lapangan kerja.

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015–2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah (2026)

Gambar 1.1 menunjukkan tren yang fluktuatif dan kecenderungan menurun dalam persentase penduduk miskin di Indonesia selama periode 2015–2024. Pada tahun 2015, angka kemiskinan tercatat sebesar 11,13% dan secara bertahap menurun hingga mencapai angka 9,22% pada tahun 2019. Namun, sebagai akibat dari pandemi COVID-19, yang memicu kontraksi ekonomi, peningkatan pengangguran, dan penurunan daya beli masyarakat, angka kemiskinan melonjak menjadi 10,19% pada tahun 2020. Setelah pandemi mulai terkendali, angka kemiskinan kembali menunjukkan perbaikan yang bertahap menjadi 9,71% pada tahun 2021, 9,57% pada tahun 2022, 9,36% pada tahun 2023, dan terus menurun hingga mencapai 8,57% pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami peningkatan akibat krisis, tren jangka panjang memperlihatkan adanya pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan sangat sensitif terhadap pergeseran ekonomi. Selain itu, penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia masih belum merata di seluruh wilayah. Tingkat kemiskinan di daerah pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah

perkotaan, sementara wilayah Indonesia bagian timur menghadapi tantangan yang lebih kompleks akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lapangan pekerjaan. Ketimpangan pembangunan antarwilayah ini memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat masih berada dalam kondisi rentan dan belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.

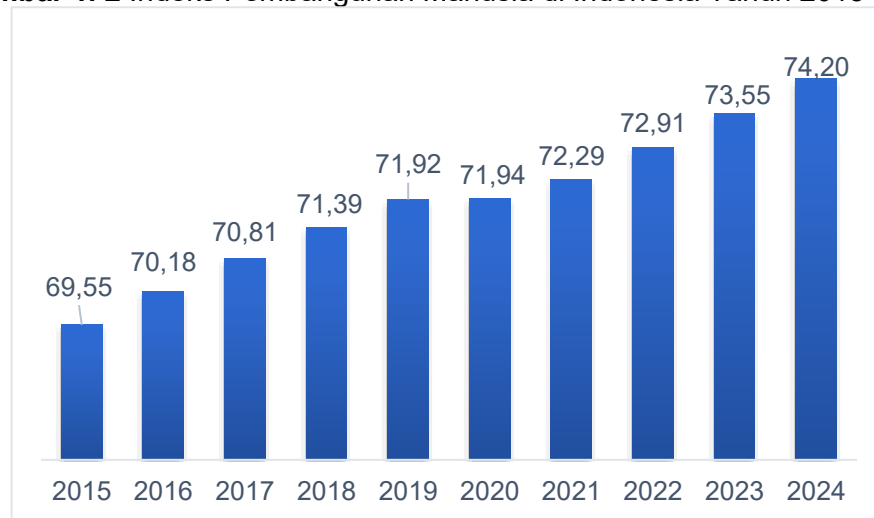
Masalah kemiskinan di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan beberapa aspek, antara lain ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kesenjangan sosial yang terkait. Seseorang yang lahir dalam keluarga miskin sering kali terpaksa bekerja sejak masih berusia dini untuk membantu perekonomian keluarga sehingga pendidikan mereka menjadi terabaikan. Kondisi ini menyebabkan anak-anak tidak memperoleh pendidikan yang layak, yang pada gilirannya mengurangi kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang memadai di masa dewasa, sehingga memperburuk siklus kemiskinan (Nursita & Purwanto, 2022). Fenomena ini sering disebut sebagai “lingkaran kemiskinan”, di mana rendahnya produktivitas, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, dikombinasikan dengan pendapatan yang kecil serta tingkat pengangguran yang tinggi, saling terkait dan memperkuat terjadinya kemiskinan.

Satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan individu untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas hidup mereka untuk memperoleh sumber pendapatan yang layak. Salah satu faktor yang berperan penting untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dari uraian tersebut, sumber daya manusia yang berkualitas berperan penting dalam mendorong pembangunan

ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Untuk mencapai itu maka perlu ditingkatkannya pembangunan manusia. Untuk mengukur hal tersebut dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut (Wardani et al., 2023) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang ditujukan untuk melihat seberapa besar pencapaian pembangunan kualitas hidup di masyarakat terhadap pembangunan sosial ekonomi suatu negara, yang dikelompokkan berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan dimensi taraf hidup yang layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja penduduk karena keterbatasan tingkat pendidikan, kondisi kesehatan yang kurang optimal, serta rendahnya standar hidup. Produktivitas yang rendah tersebut pada akhirnya berdampak pada rendahnya pendapatan yang dihasilkan masyarakat, sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi terbatas.

Dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, akan berdampak terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan (Hilmy Abdullah & Astuti, 2023). Sebaliknya, angka kemiskinan yang tinggi juga berpotensi untuk menghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Hal itu disebabkan oleh kelompok masyarakat yang berada dalam kemiskinan sering terkendala untuk mengakses fasilitas pendidikan yang berkualitas serta pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Kondisi ini bukan hanya memperlambat perbaikan kualitas sumber daya manusia tetapi juga mengakibatkan sulitnya keluar dari siklus kemiskinan.

Gambar 1. 2 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2015–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah (2026)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia selama periode tahun 2015 – 2024 menunjukkan tren yang positif. IPM Indonesia pada tahun 2015 menyentuh angka 69,55, lalu pada tahun 2016 mengalami kenaikan hingga mencapai angka 70,18, IPM terus mengalami kenaikan pada tahun 2017 dengan capaian 70,81. Kenaikan ini terus berlanjut pada tahun 2018 dengan capaian 71,39 dan tahun 2019 sebesar 71,92. Namun pada tahun 2020, IPM Indonesia mengalami kenaikan yang cenderung tidak signifikan dengan capaian sebesar 71,94. Setelah itu, tahun 2021 IPM kembali naik hingga mencapai angka 72,29 dan pada tahun 2022 naik kembali menjadi 72,91. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2023 dengan capaian 73,55 dan mencapai angka tertinggi selama sepuluh tahun terakhir pada tahun 2024 yaitu sebesar 74,20.

Peningkatan IPM yang relatif stabil dari tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan adanya kemajuan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, serta peningkatan daya beli masyarakat sebelum masa pandemi. Namun, pada periode 2019–2020 terlihat bahwa kenaikan IPM cenderung melambat, yaitu dari 71,92 menjadi 71,94, yang mengindikasikan adanya dampak pandemi COVID-19

terhadap pembangunan manusia, terutama pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kondisi ekonomi masyarakat. Setelah pandemi, IPM kembali menunjukkan akselerasi peningkatan mulai tahun 2021 hingga 2024. Kenaikan dari 72,29 (2021) menjadi 74,20 (2024) menandakan adanya proses pemulihan pembangunan manusia yang cukup baik, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi, meningkatnya akses pendidikan, serta perbaikan layanan kesehatan.

Ketimpangan ekonomi masih menjadi isu penting dalam pembangunan nasional. Sejumlah laporan ekonomi menunjukkan bahwa perbedaan tingkat pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok berpenghasilan rendah masih cukup besar di Indonesia. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, serta kepemilikan aset ekonomi. Akibatnya, tidak semua kelompok masyarakat dapat menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi secara merata. Ketimpangan distribusi pendapatan ini berpotensi memperlambat proses pengentasan kemiskinan karena kelompok masyarakat berpendapatan rendah memiliki keterbatasan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka

Ketimpangan pendapatan adalah distribusi total dari pendapatan yang memiliki perbedaan yang tidak seimbang di antara rumah tangga yang ada di suatu negara atau suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat ketimpangan maka semakin besar pula perbedaan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan tidak akan luput dari adanya perbedaan karakteristik antarwilayah baik dari segi sumber daya, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia yang mana dapat menyebabkan adanya permasalahan mengenai ketimpangan distribusi pendapatan. Adanya perbedaan distribusi pendapatan di berbagai wilayah dapat mempengaruhi kemampuan wilayah

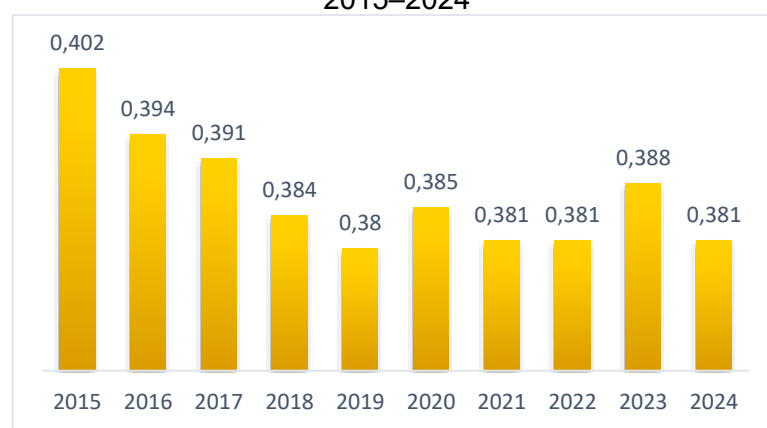
tersebut untuk berkembang lebih maju dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan ketimpangan pendapatan antarwilayah menjadi lebih besar (Farhan & Sugianto, 2022).

Fenomena ini menunjukkan bahwa perbedaan distribusi pendapatan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dapat menyebabkan tidak meratanya pendapatan antar suatu kelompok masyarakat sehingga masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah hanya mendapatkan sedikit manfaat dari pembangunan ekonomi jika dibandingkan dengan masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Ketimpangan yang tinggi tersebut dapat berpengaruh terhadap akses ke pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Ketika distribusi pendapatan tidak merata, masyarakat berpenghasilan rendah akan kesulitan untuk membiayai pendidikan yang layak, tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan yang memadai. Kondisi ini dapat menyebabkan masyarakat miskin tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sehingga berakibat pada berkurangnya produktivitas dan pendapatan (Insani et al., 2025).

Untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat, digunakan indikator yang dikenal sebagai rasio Gini (*Gini Ratio*). Nilai rasio Gini berada pada rentang antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati angka 1 menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi karena sebagian kecil penduduk menguasai proporsi pendapatan yang sangat besar dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Sebaliknya, apabila nilai rasio Gini semakin mendekati angka 0, maka kondisi tersebut mencerminkan distribusi pendapatan yang semakin merata, sehingga perbedaan tingkat pendapatan antar individu atau antarkelompok masyarakat relatif kecil. Oleh karena itu, rasio Gini banyak digunakan dalam analisis ekonomi pembangunan sebagai indikator

penting untuk mengevaluasi tingkat pemerataan hasil pembangunan, mengidentifikasi kesenjangan ekonomi, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik yang bertujuan mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Adam et al., 2022).

Gambar 1. 3 Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) di Indonesia Tahun 2015–2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah (2026)

Gambar 1.3 menunjukkan tren yang menurun secara fluktuatif dalam ketimpangan pendapatan yang diukur dengan rasio gini dari tahun 2015 hingga 2024. Rasio Gini mencapai angka 0,402 pada tahun 2015, tetapi kemudian turun menjadi 0,394 pada 2016 dan 0,391 pada 2017. Penurunan terus berlanjut hingga pada tahun 2018 mencapai 0,384 dan pada tahun 2019 turun menjadi 0,34. Kemudian pada tahun 2020, rasio Gini kembali meningkat menjadi 0,385. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi pada tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2021, rasio gini mengalami penurunan hingga mencapai 0,381, dan pada tahun 2022, rasio gini relatif stabil pada angka yang sama. Pada tahun 2023, rasio gini kembali meningkat hingga mencapai 0,388, tetapi pada tahun 2024, rasio gini kembali menurun hingga mencapai 0,381.

Penurunan rasio Gini menjadi 0,381 pada tahun 2024 kerap disambut sebagai kabar baik. Namun, analisis kritis dari berbagai lembaga mengungkapkan

bahwa perbaikan angka ini perlu dibaca secara hati-hati. Laporan *World Inequality Report 2026* memotret ketimpangan Indonesia dari sisi yang lebih dalam: 10 persen kelompok terkaya menguasai sekitar 46 persen dari total pendapatan nasional, sementara 50 persen kelompok terbawah hanya menerima 14 persen. Konsentrasi kekayaan bahkan lebih timpang, di mana 10 persen orang terkaya menguasai sekitar 59 persen total kekayaan (Noor, 2025).

Fenomena ini dipicu oleh kuatnya eksistensi oligarki dan melemahnya daya saing industri manufaktur, yang membuat perekonomian bertumpu pada sektor ekstraktif padat modal seperti tambang dan sawit yang minim penyerapan tenaga kerja. INFID juga mengingatkan bahwa rasio Gini hanya mengukur pengeluaran, bukan kekayaan atau aset seperti tanah dan saham. Kelompok bawah mungkin belanjanya naik karena disubsidi bansos, sementara kelompok atas menahan belanja mewah, tetapi secara aset, jurang antara si kaya dan si miskin justru semakin melebar (Bedisa, 2026).

Meskipun rasio Gini di Indonesia telah mendekati angka 0 yang tergolong dalam kategori ketimpangan rendah, kondisi tersebut belum sepenuhnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan ketimpangan pendapatan tidak selalu diikuti dengan penurunan angka kemiskinan. Fenomena kemiskinan di Indonesia juga erat kaitannya dengan permasalahan ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan kemampuan sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja. Terbatasnya lapangan pekerjaan dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat berpotensi mendorong bertambahnya jumlah penduduk miskin (Widiana et al., 2023).

Selain itu, kondisi ketenagakerjaan juga turut mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah

pengangguran pada Februari 2024 masih mencapai sekitar 7,2 juta orang. Tingginya jumlah pengangguran tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh angkatan kerja dapat terserap dalam kegiatan ekonomi sehingga berpotensi menurunkan tingkat pendapatan masyarakat dan meningkatkan risiko kemiskinan (Dwi, 2024).

Salah satu faktor yang mencerminkan meningkatnya jumlah penduduk miskin di suatu daerah adalah pengangguran, Peningkatan tingkat pengangguran menyebabkan banyak individu tidak memiliki sumber pendapatan, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) digunakan untuk mengukur proporsi penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, telah siap bekerja, namun belum memperoleh pekerjaan. Tingginya nilai TPT menunjukkan bahwa banyak tenaga kerja yang belum terserap dalam pasar kerja, sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya risiko kemiskinan. Sebaliknya, penurunan TPT mencerminkan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.

Gambar 1. 4 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2015–2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah (2026)

Gambar 1.4 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan yang fluktuatif. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka mencapai angka 6,81%, tetapi secara bertahap menurun menjadi 5,61% pada tahun 2016, turun menjadi 5,61% pada tahun 2017, turun menjadi 5,5% pada tahun 2018, dan turun menjadi 5,23% pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka naik yang signifikan menjadi 7,07%. Peningkatan tersebut merupakan dampak dari adanya pandemi yang menyebabkan banyaknya perusahaan yang mengalami penurunan kegiatan produksi sehingga mereka memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta terbatasnya lapangan pekerjaan yang baru. Sehingga menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan secara drastis pada kurun waktu yang sebentar. Setelah tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka kembali mengalami tren penurunan menjadi sebesar 6,49% pada tahun 2021. Kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 5,86% pada tahun 2022, 5,32 pada tahun 2023 dan terus menurun hingga mencapai angka 4,91% di tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa adanya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia disebabkan oleh penyerapan tenaga kerja yang meningkat seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi. Dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, maka sebagian tenaga kerja yang sebelumnya menganggur akan memperoleh pendapatan yang stabil. Sehingga menyebabkan menurunnya jumlah penduduk miskin. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan daya beli di masyarakat sehingga bisa berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan.

Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan hingga 4,74% pada awal tahun 2026 yang merupakan salah satu level terendah dalam

sepuluh tahun terakhir. Namun, ada sejumlah tantangan struktural yang perlu diperhatikan dengan capaian ini. Menurut Lembaga INFID, meskipun terdapat penurunan jumlah pengangguran, kualitas pasar tenaga kerja justru belum menunjukkan perbaikan signifikan. Per Februari 2026, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 57,70% pekerja Indonesia masih berada di sektor informal yang tidak memiliki perlindungan sosial dan kepastian pendapatan, bahkan 12,88% dari pekerja tersebut adalah pekerja keluarga yang tidak dibayar. Lebih mengkhawatirkan lagi, 32,06% penduduk bekerja atau sekitar 47,42 juta orang masuk dalam kategori pekerja tidak penuh waktu, yang terdiri dari pekerja paruh waktu (24,24%) dan setengah pengangguran (7,81%). Ini menunjukkan bahwa satu dari tiga pekerja di Indonesia tidak bekerja secara penuh (Bedisa, 2026).

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) turut menyoroti fenomena pengangguran usia muda di Indonesia yang mencapai 17 persen, menjadikannya yang tertinggi di Asia. Pada saat yang sama, lebih dari 1,01 juta pemegang gelar universitas tercatat menganggur pada awal 2025, mencerminkan fenomena pengangguran terdidik yang mengkhawatirkan. Risiko ini diperparah dengan meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sepanjang Januari-November 2025 mencapai 79.302 orang, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang sekitar 67.000 orang. Peneliti CSIS memperingatkan bahwa kelompok pengangguran muda dan terdidik ini berbahaya karena mereka melek digital dan vokal, sehingga jika tidak terserap pasar kerja dapat menjadi "bom waktu" yang suatu saat bisa meletup dan menimbulkan ketidakpuasan sosial. Dengan kata lain, penurunan TPT belum sepenuhnya mencerminkan membaiknya kesejahteraan

tenaga kerja karena masih tingginya kerentanan, *missmatch* kompetensi, dan rendahnya kualitas pekerjaan yang tersedia. (Rizky & Arief, 2026)

Penelitian yang dilakukan oleh Setiyawan (2021), menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2020. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan penurunan tingkat kemiskinan. Ini disebabkan oleh semakin tinggi kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas kerja penduduk, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah pendapatan yang dapat dihasilkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dapat membantu mengurangi jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Lalu, penelitian Yulianti & Projo (2025) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022. Artinya semakin naik nilai Indeks Pembangunan Manusia maka kemiskinan di suatu wilayah akan menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Aini & Nugroho (2023) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh tidak signifikan, dan memiliki pengaruh yang positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2020. Hal ini berarti bahwa meskipun peningkatan ketimpangan pendapatan cenderung diikuti oleh peningkatan kemiskinan, pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan, namun belum memberikan dampak yang signifikan tanpa didukung oleh faktor-faktor lain. Secara umum, peningkatan

ketimpangan pendapatan dapat membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyoningrum (2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia” menghasilkan kesimpulan yang berisi, IPM berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Hal ini berarti bahwa peningkatan IPM akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan, karena kualitas sumber daya manusia yang lebih baik mampu meningkatkan produktivitas serta peluang memperoleh pendapatan yang layak. Selain itu, penelitian tersebut juga menemukan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga peningkatan jumlah pengangguran akan berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan.

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan yaitu, penelitian antara variabel Indeks Pembangunan Manusia, ketimpangan pendapatan dan pengangguran terhadap kemiskinan masih dilakukan secara parsial. Variabel tersebut hanya dilakukan dengan menguji salah satu atau dua variabel independen terhadap variabel dependen. Pendekatan tersebut masih belum menjelaskan mengapa fenomena kemiskinan disebut sebagai masalah multidimensional karena harus dipengaruhi oleh faktor lain yang saling berkaitan dan bekerja secara bersamaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti memiliki ketertarikan mengambil topik kemiskinan dengan mengajukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Ketimpangan Pendapatan dan Pengangguran Terbuka Terhadap**

Kemiskinan.” Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga analisis tidak hanya dilakukan secara parsial, tetapi juga secara bersama-sama. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan serta mengidentifikasi variabel yang memiliki pengaruh paling dominan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan kajian kemiskinan dengan menggunakan variabel IPM, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran terbuka. Peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada peningkatan kualitas manusia, pemerataan distribusi pendapatan, serta penciptaan lapangan kerja yang selaras dengan kapasitas masyarakat, sehingga mampu menekan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan. Tanpa adanya penelitian ini, kontribusi relatif dari ketiga dimensi tersebut terhadap kemiskinan tidak akan dapat diidentifikasi secara empiris. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tetap bersifat parsial dan kurang tepat sasaran. Lebih lanjut, ketidakmampuan dalam menangani kemiskinan secara struktural dapat mendorong terjadinya penurunan posisi masyarakat kelas menengah ke dalam kelompok rentan miskin, bahkan hingga jatuh di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, ketiadaan penelitian ini tidak hanya menghambat pemahaman terhadap akar permasalahan, tetapi juga berpotensi mempercepat melemahnya kelas menengah yang selama ini berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia?
2. Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia?
3. Apakah pengangguran terbuka berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia?
4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran terbuka secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dengan kemiskinan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan dengan kemiskinan di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terbuka dengan kemiskinan di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran terbuka secara simultan terhadap kemiskinan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan, maka dibagi menjadi 3 yaitu manfaat teoritis: praktis dan akademis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi khususnya yang berkaitan dengan kemiskinan, pengembangan manusia, ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Sehingga diharapkan penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan pendekatan simultan dalam menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat praktis adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan oleh para pemangku kebijakan untuk merumuskan bagaimana kebijakan tersebut akan efektif untuk menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan sumber daya manusia, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran umum yang jelas mengenai pentingnya peningkatan sumber daya manusia, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan sehingga bisa keluar dari jurang kemiskinan.

3. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa ataupun peneliti sebagai bahan referensi atau literatur tambahan untuk mengkaji lebih lanjut yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab kemiskinan.

1.5 Batasan Penelitian

Peneliti menetapkan adanya batasan penelitian dengan tujuan agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan sesuai dengan tujuan dari dilakukannya penelitian ini sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal serta memperjelas ruang lingkup permasalahan. Adapun batasan penelitian yang digunakan, meliputi:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada tiga variabel independen yaitu Indeks Pembangunan Manusia, ketimpangan pendapatan dan Tingkat Pengangguran Terbuka dan menggunakan satu variabel dependen yaitu kemiskinan.
2. Ruang lingkup penelitian ini mencakup tingkat nasional, yaitu 34 provinsi yang ada di Indonesia dalam periode 2015-2024, dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistika.